

BAB II

KEBERADAAN DISKRIMINASI GENDER DI JEPANG

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, di Jepang menurut sejarahnya pernah terjadi diskriminasi terhadap perempuan, di mana perempuan saat itu tidak memiliki kebebasan dalam pendidikan, pekerjaan, Hal ini berlangsung awalnya dari Zaman Feodal, puncaknya pada Zaman Meiji. Diskriminasi adalah sebuah bentuk penindasan terhadap seseorang atau sebuah kelompok sehingga mereka tidak bisa menikmati hak-hak asasi manusia. Pada saat itu perempuan tidak memiliki kebebasan dalam pendidikan, pekerjaan, juga dalam pernikahan. Dapat dikatakan bahwa permasalahan diskriminasi gender ada di Jepang.

Diskriminasi gender merupakan perlakuan tidak adil atau tidak menguntungkan yang dilakukan oleh satu orang atau sebuah kelompok berdasarkan jenis kelaminnya. Diskriminasi gender di Jepang terkait adanya sistem keluarga pada Zaman Meiji yang disebut dengan Sistem *Ie* dan berlangsung sampai Perang Dunia II. Zaman Meiji di Jepang dimulai dari tahun 1868 dan berakhir pada tahun 1945 setelah Perang Dunia II berakhir. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa diskriminasi gender di Jepang berkembang dalam waktu yang cukup lama. Hal ini didukung oleh Ajaran Konfusianisme yang menyebar di Jepang yang mengambil bagian dalam penyebaran patrilineal. Akibatnya sampai saat ini patriarki masih menjadi pilar dalam kehidupan bermasyarakat di Jepang, meskipun status perempuan sudah mengalami peningkatan, tetapi diskriminasi gender masih ada sampai pada abad ke-21.

A. Awal Keberadaan Diskriminasi di Jepang

Sebagaimana disebutkan di atas, status perempuan di Jepang mengalami kemunduran sejak zaman feodal. Feodalisme bertahan cukup lama dari abad ke-12 sampai pertengahan abad ke-19, ditandai dengan kemunculan banyaknya keluarga militer yang menjadi penguasa di berbagai daerah dan menyebarnya ajaran Konfusianisme.

1. Ajaran Konfusianisme

Ajaran Konfusianisme di Jepang mengambil bagian dalam penyebaran patrilineal. Dalam Konfusianisme, kebebasan perempuan dibatasi dan dan

mereka harus tunduk kepada laki-laki. Selain itu, jika perempuan telah menjadi seorang istri, maka ia harus mengabdikan hidupnya hanya untuk suami dan keluarganya saja tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Hal ini semakin memburuk ketika Jepang melakukan isolasi diri dari negara lain pada masa kepemimpinan Shogun Tokugawa, atau yang disebut dengan *sakoku* (鎖国). Periode ini diketahui sebagai Zaman Edo (1600-1868) dan dapat dikatakan zaman ini merupakan sejarah yang buruk bagi kaum perempuan Jepang, di mana ruang gerak perempuan dalam masyarakat semakin sempit dan posisi mereka dalam hierarki menjadi sangat rendah karena golongan *samurai* yang semakin berkuasa dan mengambil seluruh peran kepemimpinan dalam negara (Hartono, 2007).

Sebelum ajaran Konfusianisme masuk ke Jepang dan melanggengkan patrilineal, Jepang sempat menggunakan matrilineal dalam sub-strata masyarakat. Dalam naskah-naskah Cina kuno, memiliki pemimpin seorang perempuan merupakan hal yang umum pada abad ketiga; bahkan Jepang sempat dipimpin oleh kaisar perempuan pada akhir abad ke-8. Perempuan masih memiliki kebebasan pada zaman Heian dan pada awal zaman feodal perempuan masih mendapatkan warisan dalam keluarganya. Namun akhirnya status perempuan menurun sejak ajaran Konfusianisme – ajaran yang berasal dari Cina dan didominasi oleh laki-laki – masuk ke Jepang dan menggeser sistem matrilineal.

2. Sistem *Ie*

Diskriminasi di Jepang juga ditunjang dengan adanya sistem rumah tangga tradisional Jepang bernama *Ie* (家) dan menganut sistem patrilineal dalam praktiknya. *Ie* memposisikan laki-laki pada posisi tertinggi dalam hierarki rumah tangga, sementara perempuan hanya mengurus urusan domestik rumah tangga saja. Ini berarti hanya laki-laki saja yang bisa melanjutkan garis keturunannya, dan perempuan tidak memiliki banyak peran dalam lingkungan keluarga. Rumah tangga dengan sistem patrilineal ini sebenarnya sudah muncul pada Zaman Muromachi (1336-1573) dan berfungsi untuk memastikan pola pewarisan tersebut selama periode ketidakstabilan politik dan militer dari abad ke-15 hingga awal abad ke-17. Pada pertengahan Zaman Edo, sistem rumah

tangga patrilineal telah menyebar di luar keluarga *samurai*, para pendatang, dan pedagang kaya raya yang khawatir tentang mewariskan asset mereka melalui warisan patrilineal. Sistem ini mencabut hak perempuan elit karena mengurangi hak waris mereka dan membatasi pola pernikahan dan melahirkan anak mereka (Ambros, 2015:97-99).

Kelompok-kelompok besar yang berada di masyarakat, seperti *dōzoku*, perusahaan, dan bahkan seluruh bangsa, adalah perpanjangan dari sistem *ie* tersebut. John Embree merupakan seorang antropologis Amerika pertama yang mencatat pentingnya *ie* dalam struktur sosial dalam pedesaan di Jepang. Dalam buku klasiknya yang berjudul *Suye Mura* (1939), Embree mengatakan unit sosial utama dalam *buraku* (pedesaan) adalah rumah tangga. Rumah tangga ini berisikan keluarga kecil, mungkin seperti kakek-nenek yang sudah pensiun, satu atau dua pelayan untuk membantu pekerjaan dalam rumah tangga dan berkebun. Ukuran sebuah *buraku* diperhitungkan dengan jumlah rumah tangga, bukan dari seberapa banyaknya orang dalam satu pedesaan, dan partisipasi dalam kooperasi *buraku* seperti pemakaman atau pembangunan jembatan dalam per rumah tangga (Embree, 1939:79), sedangkan Ino Ue Tetsujiro, seorang ahli filsafat Jepang, mengatakan bahwa *ie* memiliki konsep keluarga yang berbeda dari negara lain, yaitu:

- 1) memiliki seorang kepala keluarga (*kachou*) untuk memimpin sebuah *ie*,
- 2) seluruh anggota *ie* harus taat dan menghormati *kachou*,
- 3) adanya kesinambungan sejarah keluarga dari masa lampau hingga ke masa kini. (Ienaga, 1978:8)

Kemudian melengkapi pendapat Tetsujiro, Torigoe Hiroyuki (melalui Anwar, 2007) mengungkapkan bahwa *ie* merupakan sebuah unit dasar bagi orang Jepang yang mempunyai tiga ciri khas, yaitu:

- 1) mempunyai *zaisan*, yaitu harta benda sebagai warisan dan berdasarkan hal itu diselenggarakan suatu aktivitas kehidupan bersama yang berkaitan dengan perekonomian bersama,
- 2) *sosen suuhai*, secara periodik menyelenggarakan upacara pemujaan terhadap arwah leluhur *ie*,

- 3) melestarikan *myoji*, yaitu mengutamakan kesinambungan nama keluarga dan meneruskan kelangsungan keturunan dari generasi ke generasi berikutnya.

Di Jepang terdapat tradisi pemujaan arwah leluhur anggota keluarganya (*sosen suuhai*) untuk meneruskan nama keluarganya. Takeda Chosu (dalam Anwar, 2007) mengungkapkan tradisi ini merupakan sebuah kewajiban moral yang dijalankan oleh orang Jepang dan dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Untuk melanjutkan tradisi tersebut, maka keluarga dalam *Ie* dianggap dapat meneruskan dan menjamin keberlangsungan nama keluarga tersebut. *Kachou* dapat mengadopsi seorang anak laki-laki jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki keturunan laki-laki untuk menjadi penerus dari keluarga *Ie*, seperti mengadopsi keponakannya atau anak angkat (*yoshi*). Selain itu, jika *kachou* meninggal dunia maka istri dari *kachou* juga dapat mengambil alih posisi tersebut, atau jika *shiyounin* (abdi dalem) memiliki kesadaran bahwa ia termasuk dalam anggota *Ie* tersebut, maka *shiyounin* juga bisa mengambil alih posisi tersebut.

Untuk orang Jepang, para anggota dari sebuah *Ie* dituntut untuk harus tunduk kepada kehendak keluarga. Mereka juga mempunyai pola pikir bahwa ketika dalam mengambil sebuah keputusan besar dalam sebuah keluarga, semua keputusan harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga demi loyalitas bersama. Dalam *Ie* ada dua prinsip yang berlaku, yaitu *nenkō joretsu* dan *shushin koyousei*. *Nenkō joretsu* merupakan sistem hierarki yang mana seseorang harus bisa menempatkan diri sesuai dengan posisinya dalam hierarki tersebut, seperti *senpai* dan *kouhai*. Dalam *Ie* yang memegang hierarki tertinggi merupakan anak laki-laki pertama (*chounan*). Artinya, jika dalam sebuah *Ie* memiliki seorang *choujo* (anak perempuan pertama), *jinan* (anak laki-laki kedua), dan *jijou* (anak perempuan kedua), maka semua harus menghormati apapun kehendak dari *chounan* tanpa memperhatikan apakah ia pantas mendapatkan perlakuan tersebut atau tidak. Sehubungan dengan hal tersebut, ada peribahasa tentang *ie*, yaitu “*baka demo chounan*,” artinya meskipun orang itu bodoh, namun karena ia adalah seorang anak laki-laki pertama maka harus dihormati sesuai dengan kedudukannya. Sementara *shushin koyousei* memiliki makna untuk

mempertahankan martabat keluarga dari orang luar dan kuatnya rasa memiliki. (Anwar, 2007:196).

Fukutake Tadashi (Haryono, 1988), seorang ahli sosiologi pedesaan Jepang, berpendapat bahwa sejak zaman Tokugawa sampai berakhirnya Perang Dunia II, *kazoku seido* (sistem keluarga) yang berlaku dalam masyarakat Jepang diatur oleh konsepsi tentang *ie* yang mengikuti cita-cita kaum *bushi*, bahkan mendapat pengakuan secara hukum dalam Hukum Sipil Meiji. *Bushi* merupakan salah satu kelompok yang dianggap penting dalam masyarakat pada zaman Tokugawa. Dalam hukum tersebut dinyatakan:

- a) Kepentingan *Ie* harus diprioritaskan daripada kepentingan pribadi. Ini berlaku kepada seluruh anggota keluarga dalam *Ie* tersebut.
- b) *Kachou* mempunyai wewenang yang besar menyangkut berbagai aspek penting dalam kehidupan keluarga, termasuk aspek perekonomian keluarga, hak waris, dan pemujaan terhadap arwah leluhur.
- c) Hubungan antara anak dan bapak (*oyako*) lebih dijunjung tinggi dibandingkan dengan hubungan suami-istri.
- d) Sebagai anak laki-laki pertama, jabatan sebagai *kachou* selalu dipegang oleh *chounan* dan ia memiliki banyak hak lainnya yang jauh lebih penting dibandingkan dengan hak anak laki-laki kedua dan seterusnya.
- e) Fungsi perkawinan diutamakan untuk menggabungkan dua keluarga *Ie* daripada menyatukan dua individu, yaitu hubungan suami-istri.
- f) Martabat *honke* (keluarga induk atau keluarga asal) lebih diutamakan dari *bunke* atau keluarga cabang (Kazuo, 1974:5-6).

Sistem yang berlaku di kalangan *bushi* tentunya sangat dipengaruhi oleh etika moral kaum *bushi* atau cara hidup ksatria militer yang dikenal dengan istilah *bushido* yang di dalamnya terkandung tiga ajaran yang sangat dominan

turut membentuk kepribadian bangsa Jepang, yakni Budhisme, Shintoisme, dan Konfusianisme.

Shintoisme dianggap sebagai ajaran naturalistik yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari orang Jepang pada zaman primitif. Shintoisme merepresentasikan penggambaran tradisional tentang politeisme di zaman Jepang kuno. Pandangan mengenai ajaran ini biasanya adalah ajaran Shintoisme memiliki karakteristik dari agama pada zaman primitive, seperti orang Jepang menyembah Dewi Matahari (*Amaterasuomikami*) atau memuja segala hal yang berada di alam, tetapi dalam ajaran Shintoisme tidak mengenal sistem doktrin; Shintoisme ada dalam berbagai bentuk sebagai kepercayaan rakyat tetapi di waktu yang bersamaan ajaran ini memiliki fitur-fitur tertentu dari agama yang terorganisir—ritual dan institusi seperti kuil—juga memainkan peran penting dalam mitologi kuno Jepang dan memberikan dasar bagi pemujaan para leluhur dan kaisar.

Sementara Buddhisme dan Konfusianisme merupakan ajaran yang datang dari luar Jepang; ajaran asing yang masuk ke Jepang. Ajaran Konfusianisme masuk ke Jepang sekitar awal abad kelima dan meninggalkan pengaruh yang dalam terhadap nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat Jepang serta cara pandang mereka dalam kehidupan. Dalam Konfusianisme terdapat sistem hierarki, seperti *senpai* dan *kouhai* dalam masyarakat Jepang. Sistem ini juga sudah diterapkan sejak lama dalam masyarakat Jepang. Hierarki ini memainkan peran penting dari generasi ke generasi, terlebih lagi dalam dunia politik.

Buddhisme masuk ke Jepang pada abad keenam ketika Korea memberikan hadiah kepada Jepang dalam bentuk patung Buddha. Awalnya ajaran ini tidak langsung menyebar ke seluruh penjuru Jepang, sampai pada abad ke-9 dan ke-10 ketika biksu dari Jepang dan Cina mulai aktif mengunjungi negaranya satu sama lain. Nato (1986) mengungkapkan prinsip filosofi dalam Buddhisme didasarkan pada persepsi mendasar dari tiga doktrin, yaitu:

- 1) **Ketidakekalan dari semua hal yang ada di dunia.** Semua hal yang berada di alam tidak ada yang bersifat abadi, selalu berubah seiring waktu, dan fana.
- 2) **Ketidakhadirannya ego dari kehidupan.** Semua hal yang ada dalam kehidupan tidak memiliki ego dan tidak substansial.
- 3) **Nirvana (ketenangan yang sempurna).** Semua hal dalam kehidupan adalah fana dan kemudian akan kembali ke non-substansial.

B. Perkembangan Diskriminasi Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki di Jepang

Perempuan pada masa Meiji dianggap kurang berguna dikarenakan fisiknya yang dianggap tidak cukup kuat untuk terjun ke dalam peperangan, akhirnya terdorong keluar dari struktur feodalisme hingga perempuan hanya dianggap sebagai peran tambahan untuk pria. Ajaran Konfusianisme menganggap perempuan sebagai objek yang penting untuk mengandung seorang anak dan mengurus keluarga, bukan sebagai manusia yang pantas untuk menerima cinta dari pasangannya. Konfusianisme cenderung bersifat puritan, menganggap hubungan cinta romantis sebagai kelemahan dan seks hanya sebagai mekanisme untuk menjaga kelangsungan keluarga (Reischauer, 1977:205).

Pada zaman Meiji hanya perempuan yang memiliki status sosial yang tinggi yang bisa mengenyam pendidikan, sementara perempuan kelas bawah kebanyakan waktunya digunakan untuk membantu keluarga, seperti membantu orang tua atau suaminya bekerja di ladang, dan sebagainya. Meski berstatus lebih tinggi, namun akses pendidikan perempuan kalangan menengah ke atas tetap dibatasi. Mereka tidak bersekolah secara resmi seperti laki-laki, tetapi mereka dilatih dalam urusan domestik; mengurus keluarga, memasak, dan lainnya. Dalam buku *Jitsugokyo*, sebuah buku pedoman yang digunakan oleh perempuan, menekankan bahwa kedudukan perempuan rendah dalam masyarakat dan mengajarkan kewajiban perempuan sebagai anak, istri, dan seorang ibu. Inti dari buku tersebut adalah ketika masih anak-anak, perempuan harus patuh kepada orang tuanya. Ketika sudah menikah, perempuan harus patuh terhadap suaminya. Ketika berumah tangga, perempuan harus patuh kepada mertuanya.

Jika seorang perempuan tidak dapat menghasilkan keturunan, maka posisinya dalam keluarga akan goyah dan kemungkinan akan disingkirkan kedudukannya dari keluarga (Hartono, 2007).

Pengaruh pendidikan ala Barat dengan cepat meluas hingga melampaui batas kewajaran, maka kaisar memberikan instruksi agar pendidikan kembali pada prinsip ajaran Konfusianisme. Maklumat Kerajaan tahun 1890 menjadi pedoman arah pendidikan Jepang bagi semua perilaku politik dan kemasyarakatan Jepang. Sekolah dasar, menengah, dan lembaga-lembaga militer menanamkan dengan kuat kepercayaan tentang kekuasaan absolut kaisar. Kaisar Mutsuhito menekankan dasar neo-konfusianisme sebagai dasar ideologi negara. Kebijakan kaisar tersebut menimbulkan diskriminasi karena sebelumnya orang yang berasal dari keluarga pejabat bisa masuk ke dalam pemerintahan, tetapi karena hal tersebut sekarang hanya orang yang berpendidikan saja yang bisa mendapatkan jabatan dalam pemerintahan. Jabatan-jabatan tinggi negara, baik militer maupun sipil, diisi oleh kaum laki-laki yang pernah mengenyam pendidikan Barat. Hingga maklumat ini dikeluarkan masih banyak perempuan yang belum bisa merasakan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Pendidikan perempuan masih dibatasi dan peluang mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pun sangat sedikit.

Dalam pernikahan pun status perempuan juga ditanamkan bahwa mereka lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki. *Meiokusha*, sebuah organisasi yang berisikan para reformis dari zaman Meiji, berargumen bagaimana seharusnya pernikahan yang ideal untuk memajukan peradaban. Perdebatan ini lagi-lagi dipengaruhi oleh ajaran Konfusianisme, dan utilitarianisme Barat serta Kekristenan. Para anggota *Meiokusha* mengecam prostitusi, praktik laki-laki memiliki selir, dan menyerukan pernikahan secara konsensual, tapi secara umum mereka membatasi hak perempuan hanya dalam pernikahan dan tidak memperluas hak-hak tersebut terhadap ruang publik serta ruang politik (Ambros, 2015:118).

Pernikahan menurut utilitarianisme Barat lebih menekankan pada peran daripada hubungan yang sedang dijalaninya, namun tetap mementingkan kebahagiaan pada pernikahan tersebut (FitzGibbon, 2002). Sementara dalam Kekristenan pernikahan adalah perjanjian yang khushuk dan publik antara laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan, dimaksudkan oleh Tuhan untuk kesenangan bersama mereka; atas

bantuan dan kenyamanan yang diberikan satu sama lain dalam kemakmuran dan kesulitan; dan, jika itu adalah kehendak Tuhan untuk prokreasi (hubungan yang bertujuan untuk meneruskan generasi sebuah keluarga) anak-anak dan pengasuhan mereka (<https://www.bcponline.org/>, diakses pada 06 Agustus 2020). Miles M. Dawson, seorang penulis Amerika yang menulis buku *The Ethics of Confucius* menjelaskan martabat pernikahan dan prokreasi yang dianggap dalam Konfusianisme sebagai bisnis keluarga daripada pernikahan sebagai keinginan pribadi (Dawson, 2002:145). Jika dilihat kembali, pada zaman Meiji pernikahan banyak melakukan perjodohan atau お見合い yang bertujuan untuk meneruskan generasi dalam keluarga tersebut (Hendry, 2011:14-21).

Pada tahun 1875, salah satu anggota *Meirokeisha* yang bernama Masanao Nakamura (1832-1891) menciptakan istilah baru bagaimana seharusnya feminine yang ideal, yaitu *ryōsai kenbō*. Nakamura sangat terpengaruh oleh konsep istri ideal dari Barat yang menganggap bahwa istri merupakan “sebagian dari hal baik” dari suami dan memperjuangkan pendidikan yang lebih baik untuk perempuan agar mereka dapat mendukung suaminya dan bisa menyediakan pendidikan moral dan reiligi yang baik untuk anak-anaknya (Ambros, 2015:118).

Konsep dari *ryōsai kenbō* menjadi tujuan utama dari pendidikan untuk perempuan pada tahun 1890-an, terutama setelah Perang Sino-Jepang (1894-1895). Namun realitanya kehidupan banyak perempuan tidak mencerminkan idealisme bahwa perempuan hanya bekerja terbatas di rumah saja; mengurus hal-hal domestik, mengurus keluarga, dan sebagainya. Perempuan dapat menyediakan tenaga dalam usaha kecil, pertanian, bahkan pabrik. Lebih jauh lagi, banyak perempuan yang menolak degradasi mereka ke ranah domestik. Mereka yang menjadi anggota pergerakan perempuan menuntut hak pilih mereka, sementara perempuan yang terpengaruh sosialisme mendorong kesetaraan untuk berpartisipasi dalam ranah politik. Namun demikian *ryōsai kenbō* menjadi alat ideologis yang penting di kekaisaran Jepang (Tsurumi, 2000:3-26).

Dalam ranah pernikahan, pada zaman Tokugawa seorang suami dapat menceraikan istrinya dengan mudah; bahkan para suami bisa meminta untuk cerai hanya dengan menulis surat kepada istrinya. Namun perempuan tidak bisa melakukan hal itu meskipun melalui cara yang resmi sekalipun. Pada saat Restorasi Meiji, undang-

undang membatasi alasan perceraian pada tujuh kejadian: perzinahan, kebodohan, pencurian, kemandulan, kecemburuan, ketidakpatuhan pada mertua, dan penyakit. Namun undang-undang menawarkan perlindungan bagi perceraian dengan menjamin seorang istri tidak dapat diusir dari rumahnya jika dia tidak punya tempat lain untuk pergi. Selanjutnya, undang-undang memperbolehkan perempuan untuk mengajukan perceraian, asalkan ia ditemani oleh sanak famili laki-laki dan bisa membuktikan jika sang suami memiliki penyakit mental atau fisik, melakukan pemborosan, atau suami dipenjara.

Perkembangan selanjutnya tepatnya pada tahun 1898, kekejaman ditambahkan ke dalam alasan seorang perempuan dapat mengajukan perceraian; hukum juga memungkinkan perceraian melalui kesepakatan bersama antara suami dengan istri. Namun hak asuh dari anak-anak mereka dipegang oleh suami.

C. Penghapusan Diskriminasi Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki di Jepang

Kekalahan Jepang pada Perang Dunia II pada 1945 membawa angin segar bagi kaum perempuan di Jepang. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II tersebut disebabkan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, di mana akibat bom itu Jepang menjadi tidak berdaya karena kehancuran yang diterima sangatlah parah. Bukan hanya itu, ternyata kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, diikuti dengan pendudukan sekutu yang diwakili Amerika di Jepang.

Amerika yang menduduki Jepang saat itu menerapkan banyak perubahan untuk negara Jepang, termasuk mengganti undang-undang. Awalnya Jepang menggunakan Undang Undang Meiji sebagai undang-undang dasar negara, kemudian Amerika mengeluarkan kebijakan untuk mengganti undang-undang Jepang menjadi Undang Undang 1947 yang dibuat pada tahun 1946. Dalam undang-undang tersebut memuat pasal tentang kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan. Sejak itu perempuan Jepang dapat kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan, berkarir, dan lain-lain, meskipun tidak semua perempuan Jepang mengambil kesempatan emas tersebut karena kebanyakan mereka sudah terpacu dengan nilai bahwa perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah terhadap laki-laki sebagaimana yang telah diuraikan di atas, yaitu tentang sistem patrilineal yang sudah lama berlaku.

Undang-undang yang baru dibuat Amerika memberikan persamaan hukum bagi perempuan secara seutuhnya, yaitu meliputi soal pernikahan, hak milik, warisan, perceraian, pilihan tempat tinggal, dan persoalan keluarga lainnya. Kaum perempuan tidak lagi terkekang dalam urusan rumah tangga, dan sudah bisa melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh laki-laki, seperti bekerja di bidang kehutanan, perikanan, bidang industri, dan lain-lain. Terlebih lagi pada 15 Oktober 1945, setelah pembentukan kabinet baru, sekutu merujuk pada kebutuhan akan hak pilih perempuan dan pencapaian kesetaraan di antara kedua jenis kelamin. Di bulan yang sama kabinet membuat keputusan untuk memperpanjang rentang usia hak pilih universal untuk semua warga negara Jepang. Mitra dalam rekanan pendidikan dari langkah yang diambil ini adalah *Joshikyouiku sasshin youkou* yang disetujui oleh kabinet pada 4 Desember, yang menyatakan bahwa harus ada kesempatan yang sama dalam pendidikan bagi kedua jenis kelamin. Hal ini menyerukan kesetaraan dalam konten pendidikan yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk saling menghormati antara kedua jenis kelamin. Upaya sekutu dalam hal ini Amerika secara konkret menetapkan:

- 1) Menghilangkan peraturan yang mencegah perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi,
- 2) Mendirikan universitas perempuan dan membuat universitas menjadi koedukasi,
- 3) Mendirikan sekolah menengah atas untuk perempuan,
- 4) Membawa konten pendidikan sekolah menengah anak perempuan ke tingkatan yang sama dengan yang ditawarkan di sekolah menengah umum,
- 5) Membuka kuliah universitas dan perguruan tinggi profesional untuk perempuan (Saito, 2014).

Keinginan para pendukung pendidikan perempuan yang sudah didambakan akhirnya dikabulkan oleh pemerintah empat bulan setelah kekalahan dalam atmosfer demokratisasi Jepang. Sekutu menyetujui kebijakan tersebut. Ada pun kerangka dasar dari sistem pendidikan yang baru adalah:

- 1) Perubahan sistem pendidikan dari sistem pendidikan ganda (*dual school system*) menjadi sistem pendidikan tunggal (*single track system*), yang dikenal sebagai sistem 6-3-3-4. 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah

menengah, 3 tahun sekolah menengah atas, dan 4 tahun institusi tersier seperti universitas.

- 2) Pendidikan yang wajib ditempuh adalah 9 tahun, termasuk sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- 3) Mengadopsi *co-education* di semua jenjang sekolah. *Co-education* adalah sistem di mana laki-laki dan perempuan diajarkan dalam satu sekolah yang sama dan tidak diajarkan secara terpisah.

Di sekolah menengah yang diwajibkan oleh pemerintah Jepang, kehadiran siswi di sekolah berjalan dengan lancar. Meskipun masih ada kesenjangan dalam jumlah pendaftaran calon siswa dalam proses pergantian sistem lama ke sistem baru, perbedaan jumlah tersebut perlahan menghilang sampai tahun 1949. Di tingkat menengah atas, pada awal tahun 1950, persentase siswa yang naik ke sekolah menengah atas adalah 48% untuk laki-laki dan 36,7% untuk perempuan. Hal ini dianggap cukup baik mengingat masih dalam proses pergantian dari sistem lama ke sistem baru. Pada tahun 1958, lebih dari setengah siswa masuk ke sekolah menengah atas dan kesenjangan gender semakin mengecil, yaitu 56,2% untuk siswa dan 51,1% untuk siswi. Dan pada tahun 1969, kemajuan jumlah siswi yang masuk ke sekolah menengah atas melampaui jumlah siswa, 79,2% untuk siswa dan 79,5% untuk siswi (Saito, 2014).

Di pendidikan yang lebih tinggi, sistem baru dimulai pada tahun 1949. Semua lembaga pendidikan tinggi sebelumnya termasuk bekas universitas kekaisaran dikelompokkan dalam status yang sama, yaitu *daigaku*. Sebagian besar bekas perguruan tinggi profesional non-gelar ditingkatkan menjadi universitas atau digabung menjadi universitas baru. Program studi sarjana di universitas baru berlangsung selama empat tahun, kecuali di bidang kedokteran, kedokteran gigi, ilmu kedokteran hewan, dan farmakologi, yang memakan waktu hingga enam tahun. Sebagai aturan umum, setidaknya satu universitas nasional didirikan di setiap prefektur. Dengan demikian, 70 universitas nasional, 8 universitas publik, dan 180 universitas swasta memulai kegiatan mereka pada tahun 1949. Universitas menggunakan sistem *co-educational*. Demi memajukan pendidikan untuk perempuan, dua universitas nasional khusus perempuan didirikan di Tokyo dan Nara.

Institusi pendidikan yang tidak dapat memenuhi syarat untuk menjadi universitas diizinkan untuk menjalani program perkuliahan selama dua tahun. Institusi pendidikan ini disebut *tanki-daigaku*. Pendidikan ini membuat perkembangan yang tidak terduga dan cukup pesat di kalangan perempuan yang ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Perempuan dan keluarga mereka yang cemas akan peluang kerja dan reputasi sosial bagi lulusan perempuan dari sarjana di universitas lebih menyukai program tersebut. *Tanki-daigaku* umumnya berorientasi pada pendidikan umum. Akses ke program ini relatif lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan program sarjana. Dengan kata lain, Jepang telah mencapai kesetaraan gender dalam ranah pendidikan, setidaknya dalam arti antara laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengakses setiap tingkat pendidikan.

